



Tangani Gepeng Secara Manusiawi

■ Gelandangan, Pengemis, dan ODGJ Masih Jadi Problem Sosial di Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Yogyakarta dewasa ini masih menjadi problematika sosial di tengah masyarakat. Deretan langkah strategis sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pun diupayakan oleh Pemkot Yogyakarta.

Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya, Heru Fitrianto, mengatakan, bahwa pihaknya berupaya menekan hal tersebut. Bagaimanapun, keberadaan orang-orang yang hidup di jalanan, khususnya gelandangan dan pengemis, harus bisa ditangani dengan baik dan manusiawi.

Ia mengungkapkan, di antara gepeng itu, ada beberapa yang termasuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan bukan warga Kota Yogya. Mereka akan dibantu pemerintah kota, untuk dirujuk ke *Camp Assessment* Dinas Sosial (Dinsos) DIY, guna mendapatkan rehabilitasi sosial.

"Jadi, saat kita dalam penanganan gepeng maupun ODGJ di Kota Yogya dan mereka warga luar kota yang tidak memiliki identitas atau tempat tinggal, kita rujuk untuk ke *Camp Assessment* Dinsos DIY," katanya, Jumat (6/9).

Ia mencontohkan, belum lama ini, instansinya menindaklanjuti laporan di media

LANGKAH PENANGANAN

- Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Yogyakarta dewasa ini masih menjadi problematika sosial di tengah masyarakat.
- Pemkot Yogyakarta mengupayakan langkah strategis sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- Gepeng yang bisa dijangkau petugas dirujuk ke camp *assessment* Dinsos DIY dan terjamin Jamkesda.

sosial terkait gepeng di sekitar Alun-alun Selatan (Alkid) Yogyakarta. Setelah terjun ke lokasi, gepeng pun bisa dijangkau oleh Tim Dinsosnakertrans, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Satpol PP, untuk dirujuk ke *Camp Assessment* Dinsos DIY.

"Kami bersama tim dibantu TKSK mencari data dan alamat asli warga gepeng tersebut. Ternyata, setelah ditelusuri, yang bersangkutan merupakan warga Kelurahan Panembahan, sehingga kita kembalikan kepada keluarganya," terangnya.

Mekanisme Jamkesda

Ketua Tim Kerja Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogya, Tutu Fidiyawati, mengungkapkan, gepeng dan ODGJ merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Mereka pun jadi perhatian pemerintah dalam hal Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), khususnya yang membutuhkan layanan kesehatan di Kota Yogya.

Dalam mekanisme Jamkesda, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat ketika menemukan PMKS. Yang pertama, warga bisa membawa PMKS ke Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit terdekat, atau jika kondisinya darurat dapat menghubungi PSC YES 119 di nomor 0274-420118. Seluruh biaya perawatan dengan menggunakan kelas tiga Jamkesda pun dijamin Pemkot Yogya, di mana ada 19 rumah sakit yang bekerja sama.

"Di sana mereka akan dicek, dengan syarat tidak memiliki identitas atau keluarga. Nantinya pihak rumah sakit memberikan surat keterangan dirawat dan Polsek memberikan surat permohonan bantuan biaya perawatan orang terlanjar yang ditujukan ke Dinsosnakertrans untuk mendapatkan rekomendasi Dinas Sosial," jelasnya.

"Selanjutnya, Dinsosnakertrans membuat surat rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan jaminan," urai Tutu. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005